Lahan SMA Landasan Ulin Belum Terbeli,
Padahal Anggaran Sudah Disediakan Rp4 Miliar

https://kalsel.prokal.co/read/news/29327-lahan-sma-landasan-ulin-belum-terbeli-padahal-anggaran-sudah-disediakan-rp4-miliar.html

Seharusnya, di akhir tahun 2019 ini. Lahan untuk pembangunan SMA di Kecamatan Landasan Ulin diwajibkan rampung. Namun hingga kini, realisasi fasilitas pendidikan ini tak kunjung terlaksana. Padahal, bulan April 2020 mendatang. Masa penerimaan siswa baru bakal bergulir. Sontak, dengan belum terlaksananya pembelian lahan ini. Otomatis pelajar SMP di Landasan Ulin yang ingin melanjutkan studi sesuai zonasinya terpaksa bakal gigit jari.

Sebagai pengingat, bahwa kebutuhan lahan SMA di Kecamatan Landasan Ulin sudah sangat genting. Lantaran sistem zonasi yang diterapkan, banyak pelajar lulusan SMP di Landasan Ulin kesulitan melanjutkan di SMA Negeri. Karena tidak adanya SMA Negeri di kawasan sana.

Untuk mengatasi polemik ini. Pemko diminta menyediakan lahan untuk pembangunan SMA di tahun 2019. Sementara pembangunan dan pengerjaan fisiknya dilakukan oleh Disdik Provinsi Kalsel di tahun 2020.

Untuk mewujudkan hal ini. Pemko menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp4 Miliar rupiah. Anggaran ini pun telah disetujui DPRD Banjarbaru di Anggaran Perubahan

tahun 2019 lalu. Dengan harapan, lahan telah tersedia di tahun 2019 dan Provinsi bisa membangun di 2020 mengingat kebutuhan yang mendesak.

Sebelumnya, Pemko juga berkomitmen bakal menuntaskan pembelian lahan ini di tahun 2019 juga. Yang mana tugas Pemko hanya menyediakan lahannya saja. Rupanya, kemarin, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Banjarbaru, M Aswan mengkonfirmasi bahwa penyelesaian pembelian lahan belum rampung hingga akhir 2019.

M Aswan menyebut bahwa sekarang progresnya di tahap dalam proses pembelian. Diklaimnya, bahwa penjual telah setuju. Hanya saja belum ada kesepakatan secara resmi..
Disinggung bagaimana menghadapi musim penerimaan siswa bari nanti. Aswan menjawab jika pihaknya bakal menyewa bangunan untuk menampung sementara para siswa SMA di tahun ajaran ke depan.

M Aswan mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk menyediakan ruangan untuk penerimaan siswa SMA baru di kawasan Landasan Ulin. Karena April nanti sudah penerimaan, sehingga perlu menambah ruanganTerpisah, Anggota DPRD Kota Banjarbaru,

Emi Lasari merespons keras soal hal ini. Dipandangnya, bahwa belum terealisasinya pembelian lahan SMA oleh Pemko di Landasan Ulin sangat mengecewakan. Lanjutnya, dengan kejadian ini. Maka ia menilai bahwa ini sebagai salah satu barometer untuk menilai kinerja dan komitmen dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Emi juga berujar, bahwa jika keseriusan dan komitmen Pemko sebelumnya untuk merealisasikan lahan dengan anggaran Rp4 Miliar ini sebatas hanya koar-koar saja. Sebenarnya apa persoalannya sehingga tidak terealisasi. Anggarannya sudah kita sepakati dan disetujui di anggaran perubahan tahun 2019. Kita curiga apakah ada tarik menarik kepentingan dalam prosesnya sehingga tidak bisa terselesaikan.

Jika kecurigaan soal adanya motif kepentingan dalam realisasi pembelian lahan ini benar adanya. Emi mengatakan bahwa hal ini sangat merugikan masyarakat, apalagi mengingat ini merupakan fasilitas pendidikan yang diidam-idamkan.

Memang diketahui, sebelum disepakatinya untuk pembelian lahan SMA di Landasan Ulin. Pihak DPRD Banjarbaru periode 2014-2019 melalui Komisi III menyambangi DPRD Kalsel untuk menyampaikan ihwal polemik ini. Mengingat,

masyarakat di Landasan Ulin mengeluh karena ketidaktersediaannya SMA Negeri di kawasan sana.

Audiensi legislatif Kota dan Provinsi ini akhirnya mendapatkan hasil dan komitmen. Yakni DPRD Provinsi bersedia menganggarkan untuk pembangunan SMAN Landasan Ulin di anggaran tahun 2020. Namun dengan catatan Pemko menyediakan lahan dan diminta rampung di akhir tahun 2019.

Hal ini langsung direspons cepat Legislatif dan Eksekutif Kota Banjarbaru. Yang mana Legislatif menyetujui anggaran Rp4 Miliar di anggaran perubahan untuk diperuntukkan pembelian lahan. Sementara Pemko melalui Dinas Pendidikan selaku leading sector bertugas mengurus segala macam tahapan pembebasan lahan ini.

Dalam beberapa pemberitaan Radar Banjarmasin sebelumnya. Disdik ketika diwawancara berkomitmen bakal merampungkannya di tahun 2019 juga. Bahkan informasi dari pihak Kecamatan Landasan Ulin, bahwa sudah ada empat titik yang disiapkan.

(Sumber: *https://kalsel.prokal.co/read/news/29327-lahan-sma-landasan-ulin-belum-terbeli-padahal-anggaran-sudah-disediakan-rp4-miliar.html)*

Sumber Berita:

1. **https://kalsel.prokal.co**, *Lahan SMA Landasan Ulin Belum Terbeli, Padahal Anggaran Sudah Disediakan Rp4 Miliar,* 31 Desember 2019.
2. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, *Persiapan Lahan Untuk SMA Baru di Landasan Ulin, Empat Lokasi Sudah Disiapkan Disdik Banjarbar,* 9 November 2019

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan

negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.

- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.